

litrus.

Teori Kebijakan Publik



Dr. Hermanu Iriawan, S.E., M.Si.

Teori
**Kebijakan
Publik**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Teori Kebijakan Publik

Dr. Hermanu Iriawan, S.E., M.Si.

 Penerbit
litrus.

TEORI KEBIJAKAN PUBLIK

Ditulis oleh:

Dr. Hermanu Iriawan, S.E., M.Si.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT. Literasi Nusantara Abadi Grup

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, November 2024

Co-writer: Luluk Ilma'nun

Editor: Zulya Rachma Bahar

Perancang sampul: Syafri Imanda

Penata letak: Syafri Imanda

ISBN : 978-634-206-125-1

©November 2024

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Hermanu Iriawan

Teori Kebijakan Publik / Penulis, Hermanu Iriawan; Co-writer, Luluk Ilma'nun. --
Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

x + 224 hlm. ; 15,5x23 cm.

ISBN : 978-634-206-125-1

1. Ilmu Sosial. I. Judul. II. Hermanu Iriawan.



PRAKATA

Kebijakan publik merupakan instrumen penting dalam menjalankan pemerintahan dan mencapai tujuan pembangunan di berbagai sektor. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai alat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Proses penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik melibatkan banyak aktor; termasuk pemerintah, lembaga legislatif, pemimpin, serta partisipasi aktif masyarakat.

Kebijakan publik mencakup berbagai jenis dan tipe yang masing-masing memiliki karakteristik dan pendekatan berbeda dalam pelaksanaannya. Pemahaman mendalam tentang konsep dasar kebijakan publik menjadi landasan penting bagi semua aktor yang terlibat. Setiap jenis kebijakan memiliki tujuan dan dampak yang berbeda. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan yang tepat sangat penting.

Peran para aktor dalam kebijakan publik, terutama para pemimpin di tingkat nasional maupun lokal, sangat menentukan keberhasilan kebijakan. Kepemimpinan yang efektif dapat memandu perumusan kebijakan dan mendorong pelaksanaannya secara efisien.

Tahapan perumusan dan formulasi kebijakan publik adalah langkah awal yang krusial. Berbagai model formulasi kebijakan digunakan untuk menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Setelah dirumuskan, implementasi kebijakan menjadi kunci untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak yang diinginkan.

Setelah itu, ada evaluasi kebijakan publik yang juga menjadi bagian penting dalam mengukur efektivitas dan keberhasilan kebijakan. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi kekuatan serta area yang perlu diperbaiki sehingga kebijakan dapat disempurnakan di masa mendatang.

Peran serta masyarakat dalam proses kebijakan publik juga sangat penting. Partisipasi aktif masyarakat memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka, sekaligus meningkatkan legitimasi dan penerimaan publik terhadap kebijakan tersebut. Melalui pemahaman yang mendalam tentang seluruh proses kebijakan publik, diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mewujudkan kebijakan yang efektif, efisien, dan berkeadilan.



DAFTAR ISI

Prakata	v
Daftar Isi	vii

BAB I

Konsep Dasar Kebijakan Publik.....	1
Pengertian Kebijakan Publik.....	1
Ruang Lingkup Kebijakan Publik.....	6
Tujuan Kebijakan Publik.....	8
Prinsip-Prinsip Kebijakan Publik.....	10
Aspek-Aspek Kebijakan Publik	13

BAB II

Jenis-Jenis Kebijakan Publik.....	17
Kebijakan Ekonomi	17
Kebijakan Sosial	32
Kebijakan Lingkungan	34

Kebijakan Luar Negeri	37
Kebijakan Teknologi.....	39

BAB III

Tipologi Kebijakan Publik.....	43
Pentingnya Tipologi Kebijakan Publik.....	43
Ragam Cara Tipologi Kebijakan.....	45
Tipe-Tipe Kebijakan.....	47
Tipologi Analisis Kebijakan	50

BAB IV

Aktor dalam Kebijakan Publik	55
Tipe Aktor dalam Proses Kebijakan Publik	55
Karakteristik Interaksi Aktor Pelaksana Kebijakan	59
Tipologi Interaksi Aktor	63

BAB V

Peran Kepemimpinan dalam Kebijakan.....	67
Pengenalan tentang Kepemimpinan dan Kebijakan	67
Pengaruh Pemimpin terhadap Visi	72
Pendekatan Inovatif dalam Kepemimpinan.....	76
Pemimpin dalam Mengelola Kemitraan Eksternal	79

BAB VI

Perumusan Kebijakan Publik	83
Proses Perumusan Kebijakan Publik	83
Alasan-Alasan Perumusan Kebijakan Publik	88
Interaksi Aktor-Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik	90

BAB VII

Formulasi Kebijakan Publik	95
Pengertian Formulasi Kebijakan Publik	95
Tahapan Formulasi Kebijakan Publik.....	99
Kategori Formulator Kebijakan	107

BAB VIII

Model Formulasi Kebijakan dari Beberapa Ahli	109
Model Formulasi Kebijakan Thomas R. Dye	109
Model Formulasi Kebijakan David Easton.....	114
Model Formulasi Kebijakan Paine & Naumes	116
Model Formulasi Kebijakan Amitai Etzioni	118
Model Formulasi Kebijakan John D. Bryson	121

BAB IX

Implementasi Kebijakan Publik.....	125
Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	125
Perkembangan Studi Implementasi Kebijakan Publik	133
Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan	143

BAB X

Model Implementasi Kebijakan Publik.....	157
Model Van Meter & Van Horn.....	157
Model Mazmanian & Sabatier	163
Model Hogwood & Gunn.....	166
Model Grindle.....	169
Model Elmore, Lipsky, Hjern & O'Porter	173

BAB XI

Evaluasi Kebijakan Publik	177
Definisi Evaluasi Kebijakan Publik	177
Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik.....	179
Jenis-Jenis Evaluasi Kebijakan Publik.....	182
Model Evaluasi Kebijakan Publik.....	184
Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Tidak Tercapainya Tujuan Kebijakan	186

BAB XII

Peran Serta Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik.....	193
Memahami Peran masyarakat.....	193
Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik.....	200
Daftar Pustaka	209
Tentang Penulis.....	217



BAB I

KONSEP DASAR KEBIJAKAN PUBLIK

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah konsep yang kompleks dan mencakup berbagai pandangan yang berbeda dari para ahli. Pada dasarnya, kebijakan publik merujuk pada serangkaian tindakan yang dirancang oleh pemerintah atau kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik juga berkaitan dengan cara pemerintah atau aktor-aktor yang terlibat dalam pemerintahan merespons masalah-masalah yang muncul dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Dwidjowijoto, 2012: 119—120).

Harold Laswell & Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik bukan hanya keputusan spontan, melainkan program yang dirancang dengan hati-hati untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program

ini juga mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat atau pemerintah serta praktik yang berlaku dalam implementasinya.

Adapun David Easton memberikan perspektif yang sedikit berbeda dengan mendefinisikan kebijakan publik sebagai akibat dari aktivitas pemerintah. Dalam pandangannya, kebijakan publik dilihat sebagai hasil dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Dengan kata lain, kebijakan publik mencakup semua tindakan dan keputusan pemerintah yang berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya terbatas pada program atau rencana, tetapi juga mencakup dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Carl I. Friederich menambahkan dimensi lingkungan dalam definisi kebijakan publik dengan menyatakan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan publik dalam pandangan Friederich dirancang untuk memanfaatkan potensi yang ada serta mengatasi hambatan yang muncul dalam lingkungan sosial, politik, atau ekonomi. Kebijakan yang diusulkan bertujuan untuk merespons berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, kebijakan publik merupakan alat untuk menghadapi dinamika yang ada di lingkungan tempat kebijakan tersebut diterapkan (Adianto & Maryani, 2014: 2).

Sementara itu, James Anderson menyoroti kebijakan publik sebagai suatu tindakan yang disengaja dan direncanakan dengan tujuan tertentu serta diikuti oleh satu atau lebih aktor kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi perhatian utama mereka. Ia juga menunjukkan bahwa kebijakan publik bersifat relatif stabil. Hal itu berarti bahwa kebijakan tersebut tidak berubah secara drastis dalam waktu singkat, tetapi memiliki durasi implementasi yang cukup panjang. Misalnya, dalam kasus meningkatnya tingkat kriminalitas di suatu kota, kebijakan publik yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut dapat berupa penguatan keamanan melalui penambahan personel kepolisian atau program rehabilitasi untuk pelaku kejahatan.

Wilson juga mengemukakan bahwa kebijakan publik mencakup tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah



BAB II

JENIS-JENIS KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi dapat diartikan sebagai rangkaian keputusan, tindakan, dan strategi yang diambil oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk mengelola, mengatur, dan mengarahkan aktivitas ekonomi suatu negara dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembangunan ekonomi. Tujuan-tujuan ini meliputi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas harga yang memadai, pengurangan pengangguran, distribusi pendapatan yang lebih merata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan ekonomi bukan hanya merupakan tindakan reaktif terhadap perubahan kondisi ekonomi, melainkan juga merupakan alat perencanaan strategis untuk mencapai visi jangka panjang pembangunan yang menyeluruh. Pada dasarnya, kebijakan ekonomi memiliki peran penting dalam

menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar, keterlibatan pemerintah, dan dinamika global yang terus berubah (Arafat, 2023: 59—69).

Dalam merancang kebijakan ekonomi, pemerintah sering kali menggunakan teori-teori ekonomi yang sudah teruji sebagai landasan pemikiran. Teori-teori tersebut membantu memetakan situasi ekonomi yang ada dan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil. Berikut dijelaskan teori-teori kebijakan ekonomi.

1. Teori Keynesian

Teori Keynesian yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes menekankan bahwa ketidakseimbangan dalam permintaan dan penawaran sering kali menyebabkan masalah-masalah ekonomi, seperti pengangguran dan resesi. Keynes menjelaskan bahwa peran aktif pemerintah sangat diperlukan untuk memperbaiki ketidakseimbangan tersebut; terutama melalui kebijakan fiskal, yaitu pengeluaran pemerintah dan perpajakan serta kebijakan moneter yang meliputi pengaturan suku bunga dan peredaran uang.

Ketika ekonomi sedang lesu dan tingkat pengangguran tinggi, pemerintah diharapkan meningkatkan pengeluarannya untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang permintaan agregat. Adapun jika ekonomi mengalami inflasi yang berlebihan, pemerintah bisa mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak untuk menurunkan permintaan.

2. Teori moneterisme

Teori moneterisme yang dipelopori oleh Milton Friedman lebih menitikberatkan pada pengendalian jumlah uang yang beredar dalam perekonomian sebagai faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Menurut pandangan monetaris, stabilitas ekonomi dapat dicapai jika pemerintah menjaga pertumbuhan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian pada tingkat yang stabil dan terprediksi.

Pendukung teori ini percaya bahwa inflasi adalah akibat dari terlalu banyaknya uang yang beredar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang tidak konsisten atau terlalu agresif dapat menciptakan ketidakstabilan. Selain



BAB III

TIPOLOGI KEBIJAKAN PUBLIK

Pentingnya Tipologi Kebijakan Publik

Tipologi kebijakan publik sangat penting karena beberapa alasan utama yang berkontribusi pada efektivitas dan pemahaman kebijakan itu sendiri. Salampessy dkk. (2023) menyebutkan beberapa poin penting mengenai pentingnya tipologi kebijakan publik, yaitu sebagai berikut.

1. Memudahkan klasifikasi dan analisis
Tipologi kebijakan publik menyediakan kerangka untuk mengklasifikasikan berbagai jenis kebijakan, seperti kebijakan ekonomi, sosial, lingkungan, dan lain-lain. Dengan adanya klasifikasi ini, analis dan pembuat kebijakan dapat lebih mudah memahami dan menganalisis karakteristik masing-masing kebijakan serta dampaknya terhadap masyarakat.
2. Mendukung proses pengambilan keputusan
Tipologi kebijakan membantu pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan panduan yang jelas tentang

pendekatan yang tepat untuk setiap jenis kebijakan. Misalnya, kebijakan redistribusi mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan kebijakan regulasi atau kebijakan publik lainnya.

3. Memfasilitasi evaluasi dan monitoring
Dengan adanya tipologi yang jelas, proses evaluasi dan monitoring kebijakan menjadi lebih sistematis. Para evaluator dapat menggunakan kriteria yang sesuai untuk menilai efektivitas kebijakan, melihat apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
4. Meningkatkan komunikasi dan pemahaman
Tipologi kebijakan publik memfasilitasi komunikasi antara berbagai pemangku kepentingan; termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan menggunakan istilah yang konsisten dan dipahami, semua pihak dapat lebih mudah berdiskusi dan berkolaborasi dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan.
5. Mendorong inovasi dan adaptasi
Tipologi yang jelas mendorong inovasi dalam pembuatan kebijakan dengan memungkinkan para pembuat kebijakan untuk melihat praktik terbaik dari tipologi yang berbeda dan mengadaptasi strategi yang berhasil dari satu jenis kebijakan ke jenis lainnya. Hal ini sangat penting dalam konteks yang terus berubah dan kompleks.
6. Membantu identifikasi isu dan tantangan
Dengan memahami tipologi kebijakan, para pembuat kebijakan dapat lebih mudah mengidentifikasi isu dan tantangan spesifik yang mungkin muncul dalam implementasi kebijakan tertentu. Ini memungkinkan mereka untuk merancang solusi yang lebih efektif dan responsif.
7. Meningkatkan akuntabilitas
Tipologi kebijakan publik juga dapat meningkatkan akuntabilitas karena memudahkan dalam penetapan tanggung jawab dan evaluasi hasil. Dengan mengetahui jenis kebijakan yang diterapkan, masyarakat dapat lebih mudah menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah terkait dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.



BAB IV

AKTOR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Tipe Aktor dalam Proses Kebijakan Publik

Dalam proses kebijakan publik, terdapat berbagai aktor yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung; baik dari sektor pemerintahan, swasta, maupun masyarakat. Setiap aktor memiliki peran penting dalam memengaruhi jalannya proses kebijakan; mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Para aktor ini dapat berkontribusi dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan, tujuan, dan kekuasaan mereka. Muadi, Ismail, & Sofwani (2016) menyebutkan bahwa aktor-aktor dalam proses kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipe berikut.

1. Aktor negara

Aktor negara adalah aktor utama dalam proses kebijakan publik yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan di berbagai tingkat, mulai dari pusat hingga daerah. Aktor negara memiliki otoritas formal dalam

merumuskan, mengesahkan, dan mengimplementasikan kebijakan publik. Beberapa aktor negara yang paling berperan dalam proses kebijakan meliputi sebagai berikut.

a. Eksekutif

Presiden, menteri, gubernur, bupati, dan wali kota adalah aktor eksekutif yang memiliki kekuasaan untuk merancang kebijakan, membuat keputusan, dan memastikan kebijakan tersebut diimplementasikan sesuai dengan rencana. Di tingkat nasional, presiden beserta kabinetnya sering kali menjadi pemimpin utama dalam inisiatif kebijakan publik.

b. Legislatif

Lembaga legislatif (seperti parlemen atau DPR) memiliki peran dalam membahas, mengesahkan, atau menolak kebijakan yang diajukan oleh eksekutif. Legislatif juga bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah.

c. Birokrasi

Aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang telah disahkan. Birokrasi bekerja untuk mengimplementasikan kebijakan di lapangan, serta bertanggung jawab dalam hal administrasi dan teknis operasional kebijakan.

d. Yudikatif

Pengadilan dan lembaga peradilan juga memiliki peran penting dalam proses kebijakan, terutama dalam menegakkan hukum dan memutuskan sengketa yang muncul terkait kebijakan publik. Keputusan yudikatif dapat memengaruhi jalannya kebijakan, terutama jika ada unsur pelanggaran hukum atau ketidakadilan dalam implementasi kebijakan.

2. Aktor non-negara

Selain aktor negara, aktor non-negara juga memainkan peran penting dalam proses kebijakan publik. Aktor-aktor ini dapat berupa individu atau organisasi yang berasal dari masyarakat sipil, sektor swasta, atau akademisi yang berpartisipasi dalam diskusi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan. Assabil & Triyatno (2023) menyebutkan bahwa aktor non-negara meliputi sebagai berikut.



BAB V

PERAN KEPEMIMPINAN DALAM KEBIJAKAN

Pengenalan tentang Kepemimpinan dan Kebijakan

Kepemimpinan adalah sebuah konsep yang telah menjadi pusat perhatian dalam banyak disiplin ilmu, seperti manajemen, psikologi, dan sosiologi. Kepemimpinan secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk memengaruhi, memimpin, dan membimbing orang lain menuju pencapaian tujuan yang diinginkan.

Dalam kenyataannya, kepemimpinan adalah konsep yang jauh lebih kompleks dan melibatkan berbagai elemen; seperti karakteristik pribadi, perilaku, hubungan antar-individu, serta visi yang dibangun oleh pemimpin tersebut. Penting untuk memahami berbagai teori kepemimpinan yang telah dikembangkan guna menjelaskan fenomena ini dari sudut pandang yang lebih luas dan beragam. Arafat (2023: 111—119) menjelaskan tiga teori kepemimpinan yang telah dikembangkan, yaitu sebagai berikut.

1. Teori *trait* atau teori ciri kepemimpinan

Kepemimpinan sebagian besar dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yang dimiliki oleh seorang individu. Sifat-sifat tertentu, seperti kepercayaan diri, kemampuan komunikasi yang baik, integritas, dan keberanian untuk mengambil risiko, sering kali dianggap sebagai ciri-ciri penting dari seorang pemimpin yang efektif. Peter G. Northouse menjelaskan terkait bagaimana ciri-ciri yang dapat membedakan seorang pemimpin dari yang lainnya, serta bagaimana sifat-sifat tersebut dapat memengaruhi kinerja seorang pemimpin dalam memimpin timnya.

2. Teori *behavioral*

Teori *behavioral* menitikberatkan pada tindakan dan perilaku pemimpin. Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang karakteristik atau sifat individu, melainkan juga tentang bagaimana pemimpin berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Dua dimensi utama yang sering dibahas dalam teori ini adalah orientasi tugas dan orientasi hubungan.

Pemimpin dengan orientasi tugas cenderung lebih fokus pada pencapaian tujuan dan pengaturan tugas. Adapun pemimpin dengan orientasi hubungan lebih memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan sosial anggota tim mereka. Dalam hal ini, Robert Kreitner & Angelo Kinicki menjelaskan dengan sangat baik bagaimana kedua dimensi perilaku ini dapat memengaruhi kinerja organisasi dan budaya kerja.

3. Teori transformasional

Teori transformasional menjadi teori yang sangat penting dalam memahami kepemimpinan, terutama dalam konteks motivasi dan inspirasi. Teori ini menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi bawahannya untuk mencapai potensi penuh mereka. Pemimpin transformasional mampu mengartikulasikan visi yang kuat, memberikan motivasi yang mendalam kepada timnya, dan menciptakan lingkungan kerja yang inovatif serta berorientasi pada pertumbuhan.

Pemimpin dalam bidang kebijakan tidak hanya harus mampu memotivasi dan menginspirasi. Pemimpin itu juga harus mampu membuat keputusan yang bijaksana, berkomunikasi dengan jelas, dan memimpin dengan



BAB VI

PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

Proses Perumusan Kebijakan Publik

Proses perumusan kebijakan publik merupakan tahap yang sangat krusial dalam siklus pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, di mana keputusan strategis diambil untuk menangani masalah yang dihadapi masyarakat. Perumusan kebijakan dalam konteks ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan proses kompleks yang melibatkan berbagai aktor dan mempertimbangkan sejumlah alternatif untuk menemukan solusi terbaik.

Dunn (2004: 132) menjelaskan bahwa perumusan kebijakan dapat dipahami sebagai upaya untuk mengembangkan dan menyintesis berbagai alternatif pemecahan masalah, yang masing-masing bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang akan diimplementasikan. Winarno (2008: 29) menekankan bahwa pemilihan alternatif yang tepat sangat penting untuk memecahkan masalah yang ada.

Menurut Islamy (2000: 24), proses perumusan kebijakan bukanlah sesuatu yang bersifat final; sebaliknya, dianggapnya sebagai proses secara berkelanjutan yang memerlukan pemahaman mendalam tentang aktor-aktor yang terlibat. Para pembuat kebijakan—baik yang berada di pemerintah maupun di luar pemerintahan—memainkan peran kunci dalam proses ini. Mereka bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan memilih alternatif kebijakan yang paling sesuai berdasarkan informasi yang ada. Dengan demikian, formulasi kebijakan mencakup metode dan strategi yang dirancang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi; serta penentuan alternatif kebijakan yang paling efektif dan efisien di antara berbagai pilihan yang tersedia.

Dalam pelaksanaannya, berikut beberapa tahap yang perlu dilakukan dalam perumusan kebijakan.

1. Perumusan masalah (*defining problem*)

Tahap awal yang sangat penting dalam proses perumusan kebijakan adalah perumusan masalah. Pemahaman yang baik terhadap masalah yang dihadapi akan memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mendasari situasi tersebut, mendiagnosis penyebab, dan memetakan tujuan yang ingin dicapai.

Ini mencakup upaya untuk menyatukan pandangan yang mungkin bertentangan dan merancang kebijakan baru yang relevan. Proses ini harus dilakukan oleh individu atau kelompok yang terpengaruh oleh masalah tersebut, dan mereka perlu memiliki kapasitas untuk melakukannya. Keberhasilan dalam merumuskan masalah secara akurat akan sangat memengaruhi kelancaran dan keberhasilan tahap-tahap berikutnya dalam pembuatan kebijakan.

2. Penyusunan agenda kebijakan

Setelah masalah didefinisikan, langkah selanjutnya adalah memasukkan isu tersebut ke dalam agenda kebijakan. Tidak semua masalah yang muncul akan mendapatkan perhatian dari pembuat kebijakan, hanya isu-isu tertentu yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat masuk ke dalam agenda. Menurut Wahab (2004: 40), kriteria-kriteria tersebut mencakup sebagai berikut.



BAB VII

FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK

Pengertian Formulasi Kebijakan Publik

Formulasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap penting dalam proses kebijakan publik yang melibatkan pengembangan pilihan-pilihan strategis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan telah diangkat menjadi isu dalam agenda publik. Formulasi kebijakan ini dapat dipahami sebagai tahap perumusan alternatif-alternatif solusi untuk menangani persoalan tersebut. Dalam konteks kebijakan publik, formulasi berfungsi untuk merumuskan batasan dan ruang lingkup kebijakan yang akan diterapkan; dengan tujuan memastikan bahwa kebijakan yang dirancang mampu memberikan solusi yang relevan dan efektif (Igirisa, 2022: 47).

Formulasi kebijakan publik dapat dianggap sebagai tahap awal yang sangat krusial karena keputusan yang diambil pada tahap ini akan sangat menentukan keberhasilan kebijakan pada tahap implementasi dan evaluasi

di masa mendatang. Oleh karena itu, formulasi kebijakan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Penting juga untuk mempertimbangkan berbagai aspek seperti dampak kebijakan terhadap masyarakat, relevansi dengan kebutuhan publik, serta konsistensi dengan kerangka hukum dan etika yang berlaku. Kehati-hatian dalam proses formulasi ini diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Setiap kebijakan publik pada umumnya merupakan kelanjutan dari kebijakan yang sudah ada sebelumnya, dengan memperhitungkan evaluasi kebijakan terdahulu dan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, proses formulasi kebijakan harus melihat keterkaitan antara kebijakan yang sedang dirumuskan dengan kebijakan yang telah ada sehingga ada kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaannya.

Dalam tahap formulasi ini, pengembangan kebijakan sering kali didasarkan pada analisis terhadap hasil evaluasi kebijakan sebelumnya. Analisis tersebut akan memberikan informasi penting mengenai keberhasilan dan kegagalan kebijakan yang diterapkan. Evaluasi itu kemudian menjadi dasar untuk merancang kebijakan baru yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Termasuk melalui pengamatan langsung terhadap fenomena sosial, penelitian ilmiah, kajian teoretis, dan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Setiap proses formulasi kebijakan harus melibatkan beberapa aspek utama; seperti kepentingan publik, manfaat kebijakan, dan relevansi kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat. Aspek-aspek ini menjadi kunci dalam menentukan arah kebijakan yang dirumuskan sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat luas.

Selain itu, proses formulasi kebijakan publik harus berlandaskan pada data dan informasi yang akurat serta analisis yang mendalam. Dalam hal ini, diperlukan kajian akademik dan pemahaman yang baik terhadap kaidah-kaidah keilmuan yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi. Kebijakan yang dihasilkan pun tidak hanya berdasarkan intuisi atau pertimbangan praktis semata, tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang kuat sehingga memungkinkan kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cara yang efektif dan efisien.



BAB VIII

MODEL FORMULASI KEBIJAKAN DARI BEBERAPA AHLI

Model Formulasi Kebijakan Thomas R. Dye

Thomas R. Dye merumuskan beberapa model formulasi kebijakan yang berfungsi sebagai alat untuk memahami bagaimana kebijakan publik dapat dihasilkan melalui proses politik dan administrasi. Setiap model yang dijelaskan oleh Dye menggambarkan pendekatan yang berbeda terhadap proses perumusan kebijakan, dengan fokus yang bervariasi dari interaksi kelompok hingga pertimbangan rasional dan peran pemerintah. Kadji (2015: 31—39) memberikan penjabaran panjang dari masing-masing model formulasi kebijakan menurut Dye, yaitu sebagai berikut.

1. Model teori kelompok (*group theory*)
Model teori kelompok menekankan bahwa kebijakan publik adalah hasil dari interaksi antara berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda-beda di dalam masyarakat. Kebijakan dilihat sebagai

titik keseimbangan atau *equilibrium* yang tercapai melalui negosiasi dan kompromi antara kelompok-kelompok ini. Proses kompromi dianggap sangat penting karena memungkinkan kebijakan yang dihasilkan dapat diterima oleh berbagai pihak.

Dalam model ini, ada empat indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas formulasi kebijakan. *Pertama*, kemampuan untuk merumuskan aturan main antarkelompok kepentingan. *Kedua*, pengaturan kompromi dan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang berbeda. *Ketiga*, terbentuknya kompromi dalam kebijakan yang dihasilkan. *Keempat*, penguatan terhadap kompromi-kompromi yang telah disepakati sebelumnya.

Model ini mencerminkan pentingnya interaksi antarkelompok dalam sistem politik yang pluralistis. Kebijakan publik dihasilkan dari tarik-menarik kepentingan kelompok yang berbeda-beda, dengan tujuan mencapai konsensus yang dapat diterima oleh semua pihak.

2. Model kelembagaan (*institutional model*)

Model kelembagaan menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan hasil dari lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki otoritas untuk membuat kebijakan. Dalam pandangan ini, pemerintah dianggap sebagai satu-satunya entitas yang sah dan memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan yang akan diterapkan secara luas kepada masyarakat.

Kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah bersifat universal dan mengikat seluruh warga negara. Dalam hal ini, pemerintah memegang peran sebagai pelaksana kebijakan serta memiliki kekuatan pemaksaan untuk memastikan implementasi kebijakan.

Indikator dari model ini mencakup tiga hal. *Pertama*, otoritas pemerintahan yang sah dalam membuat kebijakan publik. *Kedua*, kebijakan publik yang bersifat umum atau universal. *Ketiga*, peran pemerintah dalam memaksakan kebijakan yang telah dibuat agar dapat dijalankan secara efektif.

3. Model teori elite (*elite theory*)

Model teori elite berangkat dari asumsi bahwa dalam setiap masyarakat terdapat dua kelompok utama, yaitu kelompok elite yang memiliki



BAB IX

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan bagian yang sangat penting dalam proses kebijakan secara keseluruhan. Secara umum, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Wahab (1977) menjelaskan bahwa *Kamus Webster* merumuskan implementasi publik sebagai kegiatan menyediakan sarana untuk melaksanakan dan memberikan dampak praktis atau akibat dari suatu tindakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan publik berfokus pada bagaimana kebijakan yang telah dirumuskan tersebut diterapkan untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan.

Salah satu definisi penting tentang implementasi kebijakan publik dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn (1975) yang menyatakan bahwa

implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok—baik dari sektor publik maupun swasta—yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya. Implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada aktor-aktor pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan individu-individu yang memiliki peran dalam mewujudkan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, kebijakan yang dirumuskan memerlukan tindakan operasional yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan kebijakan tercapai (Subianto, 2020).

Lebih lanjut, dalam proses implementasi kebijakan terdapat tiga unsur penting yang sangat memengaruhi keberhasilannya: sumber daya manusia, kemampuan anggaran, dan kemampuan organisasi. Unsur-unsur ini harus dikelola dengan baik oleh pihak-pihak yang terlibat—baik dari sektor pemerintah maupun swasta—agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Sumber daya manusia yang kompeten dan berkomitmen, anggaran yang mencukupi, serta struktur organisasi yang efektif adalah elemen-elemen kunci yang memungkinkan kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan.

Menurut Mazmanian & Sabatier (1979), implementasi kebijakan adalah transformasi keputusan-keputusan kebijakan menjadi tindakan operasional di lapangan. Ini berarti bahwa semua keputusan yang telah diambil oleh pembuat kebijakan harus diubah menjadi tindakan nyata yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; baik melalui program-program pemerintah, peraturan-peraturan, atau mekanisme administrasi lainnya. Fokus utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang benar-benar terjadi setelah suatu program atau kebijakan diberlakukan. Ini mencakup berbagai kegiatan yang terjadi setelah kebijakan tersebut disahkan, baik dalam bentuk upaya administrasi maupun dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Grindle, implementasi kebijakan publik tidak hanya melibatkan penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur birokrasi rutin. Kebijakan publik juga mencakup masalah konflik, keputusan, dan siapa yang mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, implementasi kebijakan juga berhubungan erat dengan distribusi keuntungan atau manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan. Implementasi kebijakan harus



BAB X

MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Model Van Meter & Van Horn

Model Van Meter dan Van Horn pertama kali dikemukakan oleh Donald van Meter dan Carl van Horn pada 1975. Model ini dianggap sebagai salah satu model paling klasik dalam analisis implementasi kebijakan publik. Model ini menawarkan kerangka linier yang menggambarkan hubungan langsung antara kebijakan yang telah dirumuskan, para implementor kebijakan, serta kinerja kebijakan itu sendiri. Dalam pandangan Van Meter dan Van Horn, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada interaksi antara kebijakan yang dirancang di tingkat pusat dan pelaksanaan kebijakan di tingkat bawah (Subianto, 2020).

Model ini secara khusus mengidentifikasi enam variabel penting yang memengaruhi hubungan antara kebijakan publik dan kinerja pelaksanaannya. Sutmasa (2021) menjelaskan enam variabel penting tersebut sebagai berikut.

1. *Policy standard and objectives*

Menurut Van Meter & Van Horn, salah satu elemen kunci dalam keberhasilan kinerja kebijakan adalah standar kebijakan dan tujuan-tujuannya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada seberapa jelas indikator-indikator kinerja serta tujuan-tujuan kebijakan yang ditetapkan. Tujuan-tujuan kebijakan perlu dirumuskan dengan jelas agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan. Jika standar dan tujuan kebijakan kabur atau menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, hal ini dapat berujung pada kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, adanya pedoman yang jelas dan konkret sangat penting agar pelaksanaan kebijakan dapat memahami dengan baik apa yang diharapkan dari mereka.

2. *Policy resources*

Selain standar dan tujuan yang jelas, sumber daya kebijakan juga merupakan faktor krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud meliputi dana, materi, tenaga manusia, dan berbagai insentif yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kebijakan. Jika sumber daya tidak mencukupi atau tidak dikelola dengan baik, pelaksanaan kebijakan dapat terhambat.

Insentif juga menjadi bagian penting dalam model ini. Dalam hal ini, mereka yang berhasil menjalankan kebijakan dengan baik harus diberikan apresiasi atau penghargaan. Adapun mereka yang gagal perlu diberi “hukuman” atau konsekuensi tertentu. Dengan demikian, adanya mekanisme pemberian insentif dapat mendorong motivasi pelaksana untuk mencapai target kebijakan.

3. *Interorganizational communication and enforcement activities*

Model Van Meter & Van Horn juga menekankan pentingnya komunikasi antar-organisasi dan kegiatan penegakan. Dalam hal ini, komunikasi antar-organisasi pelaksana kebijakan sangat penting untuk memperlancar pertukaran informasi. Khususnya mengenai standar-standar kinerja dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Jika saluran komunikasi antara organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik, kemungkinan besar akan terjadi miskomunikasi yang dapat mengganggu proses



BAB XI

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Definisi Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses penting yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan. Proses ini tidak hanya berfungsi untuk mengevaluasi apa yang telah terjadi di masa lalu. Proses ini juga lebih fokus pada upaya untuk memprediksi, menghitung, dan memantau pelaksanaan program di masa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program tersebut. Dengan pendekatan yang bersifat proaktif, evaluasi ini diarahkan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan strategis sehingga dapat meningkatkan peluang keberhasilan program di masa depan (Dewi, 2022: 139).

Evaluasi kebijakan pada dasarnya bertujuan untuk mengukur dan menilai secara objektif pencapaian hasil yang telah direncanakan. Hasil evaluasi berfungsi sebagai umpan balik yang krusial terhadap proses

perencanaan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Evaluasi lebih menekankan pada perbaikan dan peningkatan daripada sekadar menyoroti kesalahan yang terjadi di masa lalu. Hal ini memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi apa yang telah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki sehingga evaluasi kebijakan dapat dianggap sebagai alat yang membantu dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik (Tayibnaxis, 2000).

Istilah evaluasi memiliki makna yang beragam dan setiap istilah yang terkait, seperti penilaian, evaluasi, dan perkiraan, mengacu pada penerapan berbagai ukuran nilai pada hasil kebijakan dan program yang telah dilaksanakan. Evaluasi dapat dipahami secara umum sebagai upaya untuk menganalisis hasil kebijakan dalam konteks nilai. Dalam pengertian yang lebih spesifik, evaluasi bertujuan untuk menghasilkan informasi tentang nilai atau manfaat dari hasil kebijakan tersebut.

Dalam hal ini, hasil kebijakan yang dinilai memiliki nilai jika berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan atau program yang berhasil dikatakan telah mencapai tingkat kinerja yang berarti. Artinya, permasalahan yang menjadi fokus kebijakan telah teratasi atau diselesaikan dengan efektif (Dunn, 2000).

Tidak ada satu pun kebijakan publik yang dapat dilaksanakan tanpa adanya proses evaluasi. Evaluasi kebijakan sangat penting untuk menilai efektivitas dan relevansi kebijakan publik dalam mempertanggungjawabkannya kepada publik serta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses ini, evaluasi diperlukan untuk mengetahui adanya gap atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dihadapi.

Dengan demikian, *outcome* atau hasil dari kebijakan dapat dikatakan memiliki nilai jika hasil tersebut memberikan kontribusi terhadap tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Sebagai contoh, *outcome* yang berhasil mengatasi permasalahan yang ada menjadi indikator bahwa kebijakan atau program tersebut telah mencapai tingkat kinerja yang signifikan.

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan penilaian terhadap substansi, implementasi, dan dampak dari suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan dalam hal ini tidak hanya dilakukan



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, K. M. 2019. "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan)". *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1).
- Adianto & Mayarni. 2014. "Analisis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam". *Administratio (Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan)*, 5(1).
- Affan, I. 2020. "Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akib, H. 2010. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana". *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- Alamsyah, K. 2019. *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Ali, M. 2017. *Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governance di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Anderson, J. E. 1978. *Public Policy-Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- _____. 1979. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

- Andriansyah D, dkk. 2024. “Regulasi Industri dalam Era Globalisasi: Peran Hukum dalam Mewujudkan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Adil”. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(2).
- Anggara, S. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arafat. 2023. *Kebijakan Publik (Teori dan Praktik)*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Arifin, Warjio, & Kariono. 2016. “Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 176 Tahun 2015 tentang Penetapan Operasional Mobil Layanan”. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 6(1).
- Arrozaaq, D. L. C. 2016. “Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo)”. Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
- Aruni, dkk. 2023. *Politik & Kebijakan Publik*. Kalimantan: Ruang Karya.
- Assabil, Q. & Agung T. 2023. “Diplomasi Budaya Korea Selatan & K-Pop pada 2021 (South Korean Cultural Diplomacy & K-Pop at 2021)”. *Jurnal Sosial Politik Peradaban (JSPP)*, 4(1).
- Basri H, dkk. 2023. “Manajemen Akademik dan Kualitas Pendidikan: Sebuah Kajian Mendalam Membangun Kepemimpinan”. *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(2).
- Bellone, C. J. 1980. *Organization Theory and The New Public Administration*. London: Allyn and Bacon, Inc.
- Caiden, G. E. 1982. *Public Administration*. Edisi ke-2. California: Palisades Publishers.
- Damayanti. 2005. “Proses Perumusan Kebijakan Publik Dan Implikasinya Bagi Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik Di Daerah”. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 2(1).
- Darmawan. 2018. “Dinamika Isu Laut Tiongkok Selatan: Analisis Sumber-Sumber Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Sengketa”. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(1).

- Dewi, D. S. K. 2022. *Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Dimock, M. E. & Gladys O. D. 1992. *Administrasi Negara*. Terjemahan Husni Thamrin Pane. Jakarta: Aksara Baru.
- Dunn, W. N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwidjowijoto, R. N. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia.
- _____. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Edward, A. V. & Aldri F. 2024. "Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Penciptaan Perilaku Inovatif dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Publik". *Polyscopia*, 1(3).
- Edwards, G. C. 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarter Press.
- Erwiningsih, W. 2009. "Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945". *Jurnal Hukum*, 16.
- Febriananingsih, N. 2012. "Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1).
- Fitri, S. N. 2022. "Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia". *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 7(1).
- Grindle, M. S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hanani N, dkk. 2023. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Hasid, Z., Akhmad N., & Erwin K. 2022. *Ekonomi Sumber Daya Alam dalam Lensa Pembangunan Ekonomi*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Hayat. 2018. *Manajemen Kebijakan Publik*. Intrans Publishing.
- Indiati. 2021. "Buku Ajar Pengantar Kebijakan Publik". Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (STISOSPOL) WASKITA Dharma Malang.

- Iskandar A, dkk. 2023. *Peran Teknologi dalam Dunia Pendidikan*. Makassar: Yayasan Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia.
- Islamy, M. I. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan ke-12. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jamaludin, A. N. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Jawa Barat: Pustaka Setia.
- Jones, C. O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jurdi, S. 2018. *Sosiologi Nusantara: Memahami Sosiologi Integralistik*. Lampung: Kencana.
- Kadir, A. 2020. *Fenomena Kebijakan Publik dalam perspektif Administrasi Publik di Indonesia*. Medan: CV Dharma Persada.
- Kadji, Y. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Karmanis. 2021. *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Kalimantan: CV Pilar Nusantara.
- Kartika, W. & Amy Y. S. R. 2024. "Analisis Implementasi Kebijakan Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik". *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1).
- Khairiyah N, dkk. 2024. "Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Inovasi pada Usaha Kecil Menengah: Tinjauan Literatur". *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3).
- Lester, J. P. & Joseph S. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. USA: Wadsworth Thomson Learning.
- Lindblom, C. E. 1984. *The Policy Making Process*. Edisi ke-2. USA: Yale University.
- Madani, M. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mahardhani. 2018. *Advokasi Kebijakan Publik*. Ponorogo: Penerbit Calina Media.
- Mansur, J. 2021. "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik". *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2).

- Margayaningsih, D. I. "Peran Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa". *Publiciana*, 11(1).
- Maulana, D. & Arif N. 2019. *Kebijakan Publik (Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik)*. Serang: CV AA RIZKY.
- Meutia, I. F. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- _____. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Mita, M. 2010. "Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana". *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- Muadi, S., Ismail, & Ahmad S. 2016. "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik". *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2).
- Musfah, J. 2022. *Kepemimpinan Pendidikan: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media.
- Mustanir, A. 2017. "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang". *Jurnal Politik Profetik*, 5(2).
- Nasdian, F. T. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nuraeni, R. 2024. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Situ Gede (Studi pada Masyarakat yang Bermata Pencaharian di Objek Wisata Situ Gede Kota Tasikmalaya)". Skripsi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi.
- Nurhayani, Muhammad S., & Tuti A. 2023. "Peran Kepemimpinan dalam Membangun Tim". *Al-Mujahadah: Islamic Education Journal*, 1(1).
- Pramono, J. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Putera, D. P. & R. Slamet S. 2016. "Evaluasi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang". *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(3).
- Putra, F. A. 2023. "Peran LSM sebagai Kelompok Penekan terhadap Penggusuran PKL di Stasiun Kota Bekasi Tahun 2013 (Studi Kasus

- Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia)”. Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional.
- Qhadri, A. P. 2016. “Analisis Gaya Kepemimpinan Situasional Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pinrang”. Skripsi pada Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Makassar.
- Riniwati, H. 2016. *Manajemen Sumberdaya Manusia: Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Rosidah I, dkk. 2023. “Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey)”. *Jurnal EMBA: Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(1).
- Rudy, D. G. & I Dewa A. D. M. 2019. “Prinsip-Prinsip Kepariwisata dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata”. *Kertha Wicaksana*, 13(2).
- Saggaf, S., Muhammad M. S., & Widiawati S. S. 2018. *Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang*. Medan: Sah Media.
- Salampessy M, dkk. 2023. *Kebijakan Publik*. Padang: CV Gita Lentera.
- _____. 2024. *Desain Kebijakan Publik (Teori dan Praktik)*. Padang: CV Gita Lentera.
- Samudra AA, dkk. 2023. *Implementasi Kebijakan Publik & Evidence-Base Policy*. Bantul: Samudra Biru.
- Satipsi, E. & Taufiqurokhman. 2019. *Design dalam Kebijakan Publik*. Tangerang: UMJ Press.
- Sawir, M. 2021. *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Shafritz, J. M. & Edward W. R. 1997. *Introducing Public Administration*. New York: Longman.
- Siagian, S. P. 1971. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- _____. 1984. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Silitonga, D. 2022. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik (Vol. 1)*. Purwokerto: Zahira Media Publisher.

- Sore, U. B. & Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: Sah Media.
- Suaib H, dkk. 2022. *Pengantar Kebijakan Publik*. Makassar: Humanities Genius.
- Subianto, A. 2020. *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: PT Menuju Insan Gemilang.
- Sutmasa, Y. G. 2021. “Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik”. *Jurnal Ilmiah Cakrawati*, 4(1).
- Suwitri, S. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Syaekhu, A. & Suprianto. 2021. *Teori Pengambilan Keputusan*. Sleman: Zahir Publishing.
- Syamsuri, H., Abdul W., & Sabbar D. S. 2024. “Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam”. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 21(1).
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).
- Taufiqurokhman, Ismail S. W., & Andriansyah. 2021. *Kepemimpinan Transformatif dan Progresif*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Tayibnapis, F. Y. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Thoha, M. 2017. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Tjokroamidjojo, B. & Mustopadidjaja. 1988. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan: Perkembangan Teori dan Penerapan*. Jakarta: LP3ES.
- Tjokroamidjojo, B. 1979. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Topani, A. C., Sintia, & Nazira A. H. S. 2023. “Implementasi Prinsip Pencemar Membayar terhadap Pencemaran Lingkungan di Pesisir Pantai Batu Ampar Akibat Pertambangan Timah”. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5).
- Triastuti, M. R. H. 2023. “Analisis Formulasi Kebijakan Kenaikan Tarif Listrik, Telepon dan BBM di Tahun 2003: Disintegrate System Model of Public Policy Toward Organizational Learning and Policy Change”. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1).

- Veranita M, dkk. 2024. "Analisis Efektifitas Kepemimpinan Transformasional dalam Penetapan Kebijakan Organisasi di Era Digital". *Journal of Governance and Public Administration*, 1(2).
- Wahab, S. A. 1997. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2008a. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- _____. 2008b. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- _____. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- _____. 2015. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- _____. 2021. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Waldo, D. 1971. *Pengantar Studi: Public Administration*. Terjemahan Slamet W. Admosoedarmo. Jakarta: Tjemerlang.
- Wayong, J. 1969. *Fungsi Administrasi Negara*. Jakarta: Djembatan.
- Wibawa, S. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisa*. Jakarta: Intermedia.
- Widodo, J. 2008. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, B. 2002a. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media.
- _____. 2002b. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Jakarta: Media Pressindo.
- Yusuf, B. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Grafindo.



TENTANG PENULIS



Dr. Hermanu Iriawan, S.E., M.Si. lahir di Biak pada 06 Mei 1972. Ia menyelesaikan pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas di Kota Biak, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Lalu pendidikan tingginya ia selesaikan mulai dari S-1 Ekonomi dan Pembangunan Uncen Jayapura (1996), S-2 Manajemen Keuangan Unhas Makassar (2010), dan S-3 Administrasi Publik Unhas Makassar (2020).

Ia berkarier sebagai dosen tetap yayasan sejak 1999 di STIA YAPIS BIAK, yang pada 2005 berubah bentuk menjadi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) YAPIS Biak. Ia kemudian berkarier sebagai dosen PNS (2005) pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI) Wilayah XIV Papua dan Papua Barat. Di IISIP YAPIS Biak ia pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Administrasi Perkantoran (2010), Dekan Fisip (2010), dan Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan (2012). Lalu sejak 2022 hingga saat ini, ia menjabat sebagai Rektor IISIP YAPIS Biak.

EXPRESS DEALS

Paket Penerbitan Buku

1-2 MINGGU
SELESAI



literasi
nusantara
Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku
800.000

Paket 5 Buku
900.000

Paket 10 Buku
1.250.000

Paket 25 Buku
1.950.000

Paket 50 Buku
2.850.000

Paket 100 Buku
4.750.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung

+6282347110445 (Tomy Permana)

+6285755971589 (Febi Akbar Rizki)

+6289605725749 (Gusti Harizal)

+6285887254603 (Faizal Arifin)

Kantor Pusat

Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Blok B11, Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

Kantor Cabang Lampung

Jl. Utama 1 No. 29 RT 024/RW 011.
Kelurahan Iringmulyo, Kec. Metro Timur,
Kota Metro. Lampung 34112.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

JASA KONVERSI

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN BAHAN PENELITIAN

MENJADI BUKU BER-ISBN

Penulis cukup mengirim filenya saja, selebihnya kami yang akan memproses editing dan penerbitannya dengan fasilitas:

Layanan Editing:

- ✓ Restruktur Kerangka Naskah
- ✓ Editing Naskah
- ✓ Proofreading
- ✓ Komunikasi Intensif
- ✓ Penerbitan Buku + Bisa mengurus HKI

Layanan Penerbitan:

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Cover
- ✓ Layout standar tinggi
- ✓ Buku Cetak & Sertifikat Penulis
- ✓ Link URL e-book

PAKET BRONZE

Rp2.300.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Ringan
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 10 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET GOLD

Rp3.800.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Sedang
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 25 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET DIAMOND

Rp5.000.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Berat
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 50 eksemplar
- Gratis Link E-book

Cetak 1000 eksemplar:

Free Layanan Launching buku, tim Litnus akan menjadi fasilitator, admin, dan host dalam **virtual launching** buku penulis.

PENDAFTARAN HKI

Express 1—2 Jam Selesai

Rp700.000

Hindari klaim orang lain atas karya Anda. Amankan setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bersama Literasi Nusantara. Dosen yang memiliki legalitas sertifikat HKI dapat mengajukan tambahan angka kredit poin KUM hingga 40 poin.

PENGADAAN BUKU FISIK MAUPUN E-BOOK UNTUK PERPUSTAKAAN DAN DIGITAL LIBRARY

- Harga Ekonomis
- Pilihan Buku Melimpah
- Buku-Buku Terbitan Tahun Terbaru
- Bisa dibantu penyusunan list judul sesuai kebutuhan
- Jaminan Garansi

FREE INSTALASI Digital Library

(Kubuku, Gramedia Digital, Aksaramaya, Henbuk, dll)

Layanan Cetak OFFSET

***Harga Ekonomis *Pengerjaan Cepat *Hasil Berkualitas Tinggi**

Telah dipercaya para guru, dosen, lembaga,
dan penulis profesional di seluruh Indonesia



PAKET PENERBITAN BUKU + HKI

1-2 MINGGU
SELESAI



**literasi
nusantara**
Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti

HKI



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak + HKI

Paket 3 Buku

1.400.000

Paket 5 Buku

1.500.000

Paket 10 Buku

1.850.000

Paket 25 Buku

2.550.000

Paket 50 Buku

3.450.000

Paket 100 Buku

5.350.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845

Alamat Kantor



Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Blok B11 Merjosari,
Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65144.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

Promo Penerbitan BUKU + HKI

Rp **1.400.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 3 eks

Rp **1.500.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 5 eks

Rp **1.850.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 10 eks

Rp **2.550.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 25 eks

Rp **3.450.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 50 eks

Rp **5.350.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 100 eks



FASILITAS

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Kover
- ✓ HKI
- ✓ Buku Cetak
- ✓ Layout Berstandar Tinggi
- ✓ Sertifikat Penulis
- ✓ Link E-Book

KEUNTUNGAN



CEPAT
Proses Penerbitan
1-2 Minggu



EKONOMIS
Hemat 25%



BERKUALITAS
Hasil berkualitas tinggi
dan berstandar Dikti



Narahubung

0858-8725-4603 | 0882-0099-32207 | 0899-3675-845



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

Teori Kebijakan Publik

KEBIJAKAN PUBLIK adalah keputusan resmi yang diambil oleh otoritas pemerintah dengan tujuan untuk mengatur dan mengarahkan perilaku, kegiatan, dan interaksi dalam masyarakat. Tujuan kebijakan publik merupakan inti dari setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengelola kehidupan masyarakat serta mengatasi berbagai permasalahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Proses penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik melibatkan banyak aktor. Termasuk pemerintah, lembaga legislatif, pemimpin, serta partisipasi aktif masyarakat. Pemahaman mendalam tentang konsep dasar kebijakan publik menjadi landasan penting bagi semua aktor yang terlibat.

Dalam buku ini disajikan 12 bab yang berkaitan dengan kebijakan publik, dengan rincian sebagai berikut.

- Konsep dasar kebijakan publik
- Jenis-jenis kebijakan publik
- Tipe-tipe kebijakan publik
- Aktor dalam kebijakan publik
- Peran kepemimpinan dalam kebijakan
- Perumusan kebijakan publik
- Formulasi kebijakan publik
- Model formulasi kebijakan dari beberapa ahli
- Implementasi kebijakan publik
- Model implementasi kebijakan publik
- Evaluasi kebijakan publik
- Peran serta masyarakat dalam proses kebijakan publik

